

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015-2024

Siti Aulia Mujahidah¹, Baiq Ismiwati²

^{1,2,3}Universitas Mataram

Corresponding Author: Sitiauliamujahidah69@gmail.com

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu sumber utama PAD berasal dari pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi, meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi dan tren pajak provinsi terhadap PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2015–2024. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi penerimaan pajak daerah dan PAD Provinsi NTB tahun 2015–2024. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis kontribusi dan analisis tren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontribusi PKB terhadap PAD memiliki rata-rata sebesar 21% dan tergolong sedang, BBNKB sebesar 20% tergolong sedang, PBBKB sebesar 16% tergolong rendah, PAP sebesar 6% tergolong sangat rendah, dan Pajak Rokok sebesar 18% tergolong rendah. Secara keseluruhan, Pajak Provinsi memiliki kontribusi tinggi terhadap PAD dengan rata-rata sebesar 76% dan menunjukkan tren yang relatif stabil selama periode penelitian. Hal tersebut menunjukkan bahwa pajak provinsi sebagai pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi memiliki peran dominan dalam pembentukan PAD Provinsi NTB.

Kata kunci: Kontribusi; Pajak Daerah; Pendapataan Asli Daerah

1. PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal yang diberlakukan sejak tahun 2001 memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah guna meningkatkan efisiensi pemerintahan dan kualitas pelayanan publik (Lewis, 2023). Kebijakan ini bertujuan memperkuat kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat (Carlos Benitez et al., 2023; Dong et al., 2025). Keberhasilan desentralisasi fiskal sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber PAD secara efektif (Musviyanti et al., 2022).

PAD merupakan indikator utama kemandirian fiskal daerah karena mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri (Hadi Rafsanjani & Agustina, 2022). Di antara komponen PAD, pajak daerah menjadi sumber

penerimaan yang paling potensial dan memiliki peranan penting terhadap keuangan daerah, khususnya pada tingkat provinsi (Kurnia & Gunarto, 2024).

Pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi terdiri atas beberapa jenis pajak yang masing-masing memiliki karakteristik objek dan mekanisme pemungutan yang berbeda sehingga kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah juga bervariasi (Yuanita Muara & Karundeng, 2023). Pajak provinsi yang relevan dalam penelitian ini meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok, yang masing-masing memiliki karakteristik dan basis pemungutan yang berbeda (Nisa Mukarramatun et al., 2024). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang pemungutannya didasarkan pada nilai jual kendaraan dan tingkat kepemilikan, sehingga penerimaannya sangat dipengaruhi oleh jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di suatu daerah (Yuanita Muara & Karundeng, 2023). Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dikenakan atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor, baik kendaraan baru maupun bekas, dan mencerminkan tingkat aktivitas transaksi kendaraan di masyarakat (Yuanita Muara & Karundeng, 2023). Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dipungut atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor; sebagai pajak tidak langsung, penerimaannya sangat bergantung pada mobilitas masyarakat dan tingkat konsumsi bahan bakar (Yuanita Muara & Karundeng, 2023). Pajak Air Permukaan (PAP) dikenakan atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan oleh pihak tertentu, terutama badan usaha, sehingga kontribusinya terhadap PAD sangat dipengaruhi oleh aktivitas sektor industri dan jasa (Yuanita Muara & Karundeng, 2023). Sementara itu, Pajak Rokok merupakan pajak atas konsumsi rokok yang pemungutannya dilakukan bersamaan dengan penerimaan cukai, sehingga menjadikannya sebagai salah satu sumber PAD yang relatif stabil dibandingkan jenis pajak lainnya (Provincial Tax Map in Indonesia, 2022).

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus berupaya meningkatkan kemandirian fiskalnya melalui optimalisasi penerimaan pajak daerah, terutama pasca gempa Lombok 2018 dan pandemi yang meningkatkan kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah (Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 2025). Data realisasi pajak daerah Provinsi NTB periode 2015–2024 menunjukkan perkembangan penerimaan pajak yang beragam antar jenis pajak.

Secara umum penerimaan PKB, BBNKB, PBBKB, dan Pajak Rokok menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Pajak Air Permukaan memiliki kontribusi relatif kecil dan cenderung fluktuatif diantara penerimaan pajak provinsi lainnya. Perbedaan dinamika antar jenis pajak tersebut mengindikasikan bahwa kontribusi masing-masing pajak dalam meningkatkan PAD dan kemandirian daerah untuk membiayai pembangunan di provinsi NTB tidak selalu sama dan dapat berubah dari waktu ke waktu.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) cenderung berfluktuasi dan berbeda antar daerah maupun periode waktu, sehingga belum memberikan gambaran yang konsisten mengenai peranan

masing-masing jenis pajak sebagai sumber utama PAD (Musviyanti et al., 2022). Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berfokus pada satu atau beberapa jenis pajak tertentu serta terbatas pada periode analisis yang relatif pendek, sehingga belum mampu menggambarkan secara komprehensif pola kontribusi dan tren seluruh pajak provinsi dalam jangka panjang. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan penelitian, khususnya dalam konteks Provinsi Nusa Tenggara Barat yang belum banyak dikaji secara menyeluruh dengan mencakup seluruh jenis pajak daerah yang dikelola oleh pemerintah provinsi dan analisis tren dalam periode yang lebih panjang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi masing-masing jenis pajak daerah serta kontribusi secara keseluruhan dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat serta mengidentifikasi tren perkembangannya selama periode 2015–2024.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis kontribusi pajak provinsi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (Sugiyono, 2022). Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan besarnya kontribusi masing-masing jenis pajak serta tren perkembangannya selama periode penelitian (Sugiyono, 2019). Data yang digunakan merupakan data sekunder time series kuartalan periode 2015–2024 yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Gujarti Damodar N & Porte Dawn C, 2018). Data meliputi PKB, BBNKB, PBBKB, Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, dan PAD.

Analisis data dilakukan melalui analisis kontribusi dan analisis tren. Kontribusi dihitung dengan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{variabel pajak provinsi}}{\text{pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

Hasil kontribusi kemudian diklasifikasikan sebagai berikut: 0–10% (sangat rendah), 10–20% (rendah), 20–30% (sedang), dan >30% (tinggi) (Aprianto eko, 2025) . Analisis tren dilakukan menggunakan grafik garis (line chart) untuk melihat pola perkembangan kontribusi dari waktu ke waktu (Sugiyono, 2019). Seluruh pengolahan data dilakukan menggunakan Microsoft Excel .

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini disajikan hasil penelitian mengenai kontribusi dan trend penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2015–2024. Analisis dilakukan terhadap beberapa jenis pajak provinsi yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar

Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), dan Pajak Rokok. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis kontribusi Pajak Provinsi secara keseluruhan terhadap PAD guna mengetahui peran pajak daerah dalam mendukung penerimaan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kontribusi PKB Terhadap Pad Provinsi NTB Tahun 2015-2024

Tabel 1. Kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2024

Tahun	PKB	PAD	KONTRIBUSI	KETERANGAN
2015	240153372762	1372661567125	17%	Rendah
2016	269187973631	1359844019438	20%	Sedang
2017	324423070254	1684468709593	19%	Rendah
2018	389092415685	1660417707373	23%	Sedang
2019	437162593976	1807482745855	24%	Sedang
2020	431770395544	1815690092106	24%	Sedang
2021	462267574746	1888456286096	24%	Sedang
2022	512761925916	2292065852875	22%	Sedang
2023	543719228162	2790069455407	19%	Rendah
2024	575485677532	2910047635096	20%	Sedang
		Rata-rata	21%	Sedang

Sumber: Olah Data Microsoft Excel

Berdasarkan tabel 1, kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap PAD berfluktuasi namun cenderung berada pada kategori sedang dengan rata-rata 21%. Kontribusi terendah terjadi pada tahun 2015 (17%) dan kembali rendah pada 2017 serta 2023 (19%). Sementara itu, periode 2018–2024 relatif stabil pada kisaran 22%–24%. Secara keseluruhan, PKB memiliki peran yang cukup penting terhadap PAD, meskipun masih perlu dioptimalkan agar kontribusinya lebih tinggi.

Kontribusi BBNKB Terhadap Pad Provinsi NTB Tahun 2015-2024

Tabel 2. Kontribusi BBNKB terhadap PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2024

Tahun	BBNKB	PAD	KONTRIBUSI	KETERANGAN
2015	318503154404.00	1372661567125	23%	Sedang
2016	322208887701.00	1359844019438	24%	Sedang
2017	313246961803.00	1684468709593	19%	Rendah
2018	357905450856.00	1660417707373	22%	Sedang
2019	404010279256.00	1807482745855	22%	Sedang
2020	281722945739.00	1815690092106	16%	Rendah
2021	318728070908.00	1888456286096	17%	Rendah
2022	353846131688.00	2292065852875	15%	Rendah
2023	435506730204.00	2790069455407	16%	Rendah
2024	504293906649.00	2910047635096	17%	Sedang
		Rata-rata	19%	Sedang

Sumber : Olah Data Microsoft Excel

Kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap PAD berfluktuasi

dengan rata-rata 20% dan termasuk kategori sedang. Kontribusi tertinggi terjadi pada 2016 (24%) dan 2024 (17%), sedangkan terendah pada 2022 (15%). Periode 2020–2023 didominasi kategori rendah (15%–17%). Secara keseluruhan, BBNKB cukup berperan terhadap PAD, namun masih perlu dioptimalkan.

Kontribusi PBBKB Terhadap Pad Provinsi NTB Tahun 2015-2024

Tabel 3. Kontribusi PBBKB terhadap PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2024

Tahun	PBBKB	PAD	KONTRIBUSI	KETERANGAN
2015	227320003266.00	1372661567125	17%	Rendah
2016	188945861622.00	1359844019438	14%	Rendah
2017	198672284249.00	1684468709593	12%	Rendah
2018	230104721006.00	1660417707373	14%	Rendah
2019	268968064291.00	1807482745855	15%	Rendah
2020	254180839093.00	1815690092106	14%	Rendah
2021	283360578376.00	1888456286096	15%	Rendah
2022	412839758081.00	2292065852875	18%	Rendah
2023	484595233855.00	2790069455407	17%	Rendah
2024	535597662398.00	2910047635096	18%	Rendah
		Rata-rata	15%	Sedang

Sumber : Olah Data Microsoft Excel

Kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) terhadap PAD tergolong rendah dengan rata-rata 16%. Selama periode 2015–2023, kontribusi konsisten berada pada kategori rendah (12%–18%), dengan nilai terendah pada 2017 (12%). Pada tahun 2024, kontribusi menjadi konsisten kembali menjadi 18%. Secara keseluruhan, peran PBBKB masih relatif kecil dan perlu dioptimalkan.

Kontribusi PAP Terhadap Pad Provinsi NTB Tahun 2015-2024

Tabel 4. Kontribusi PAP terhadap PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2024

Tahun	PAP	PAD	KONTRIBUSI	KETERANGAN
2015	297512060.00	1372661567125	2%	Sangat Rendah
2016	361290857.00	1359844019438	3%	Sangat Rendah
2017	1002734493.00	1684468709593	6%	Sangat Rendah
2018	930967523.00	1660417707373	6%	Sangat Rendah
2019	896510644.00	1807482745855	5%	Sangat Rendah
2020	1229684364.00	1815690092106	7%	Sangat Rendah
2021	1502140036.50	1888456286096	8%	Sangat Rendah
2022	1557226673.00	2292065852875	7%	Sangat Rendah
2023	1602185941.00	2790069455407	6%	Sangat Rendah
2024	1543245208.00	2910047635096	5%	Sangat Rendah
		Rata-rata	5%	Sangat Rendah

Sumber : Olah Data Microsoft Excel

Kontribusi Pajak Air Permukaan (PAP) terhadap PAD tergolong sangat rendah dengan rata-rata 6%. Seluruh periode menunjukkan kontribusi yang rendah (2%–8%), dengan nilai

terendah pada 2015 (2%) dan tertinggi pada 2021 serta 2024 (5%). Secara keseluruhan, PAP memiliki peran yang sangat kecil terhadap PAD.

Kontribusi Pajak Rokok Terhadap Pad Provinsi NTB Tahun 2015-2024

Tabel 5. Kontribusi Pajak Rokok terhadap PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2024

Tahun	PR	PAD	KONTRIBUSI	KETERANGAN
2015	224381199984	1372661567125	16%	Rendah
2016	222556939857	1359844019438	16%	Rendah
2017	343457173248	1684468709593	20%	Sedang
2018	291655115006	1660417707373	18%	Rendah
2019	293927355084	1807482745855	16%	Rendah
2020	359403216633	1815690092106	20%	Sedang
2021	352364394444	1888456286096	19%	Rendah
2022	425126352568	2292065852875	19%	Rendah
2023	415413408946	2790069455407	15%	Rendah
2024	424879931931	2910047635096	15%	Rendah
		Rata-rata	17%	Rendah

Sumber : Olah Data Microsoft Excel

Kontribusi Pajak Rokok (PR) terhadap PAD tergolong rendah dengan rata-rata 18%. Kontribusi sebagian besar berada pada kategori rendah (15%–19%), dengan kategori sedang hanya terjadi pada 2017 dan 2020 (20%) serta 2024 (17%). Secara keseluruhan, peran Pajak Rokok masih relatif kecil meskipun cenderung stabil.

Kontribusi Pajak Provinsi Terhadap PAD Provinsi NTB Tahun 2015-2024

Tabel 6. Kontribusi Pajak Provinsi terhadap PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2024

Tahun	Pajak Provinsi	PAD	Kontribusi	KETERAANGAN
2015	1010655242476.00	1372661567125.00	74%	Tinggi
2016	1003260953668.00	1359844019438.00	74%	Tinggi
2017	1180802224047.00	1684468709593.00	70%	Tinggi
2018	1269688670076.00	1660417707373.00	76%	Tinggi
2019	1404964803251.00	1807482745855.00	78%	Tinggi
2020	1328307081373.00	1815690092106.00	73%	Tinggi
2021	1418222758510.50	1888456286096.00	75%	Tinggi
2022	1706131394926.00	2292065852875.00	74%	Tinggi
2023	1880836787108.00	2790069455407.00	67%	Tinggi
2024	2041800423718.00	2910047635096.39	70%	Tinggi
		Rata-rata	73%	Tinggi

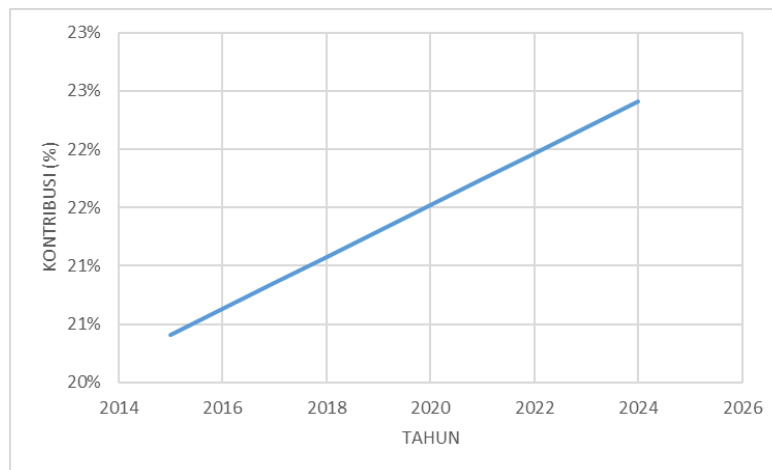
Sumber : Olah Data Microsoft Excel

Kontribusi Pajak Provinsi terhadap PAD tergolong tinggi dengan rata-rata sebesar 76%. Kontribusi cenderung stabil pada kisaran 67%–78% selama periode 2015–2023, yang menunjukkan peran yang konsisten dalam pembentukan PAD. Nilai terendah terjadi pada

tahun 2023 sebesar 67%, sedangkan kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2024 yang mencapai 70%. Secara keseluruhan, Pajak Provinsi memiliki peran yang sangat dominan sebagai sumber utama PAD, sehingga optimalisasi penerimaan pajak daerah menjadi faktor penting dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

Trend Kontribusi PKB Terhadap Pad Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2024

Grafik 1. Grafik Trend kontribusi PKB terhadap PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2024

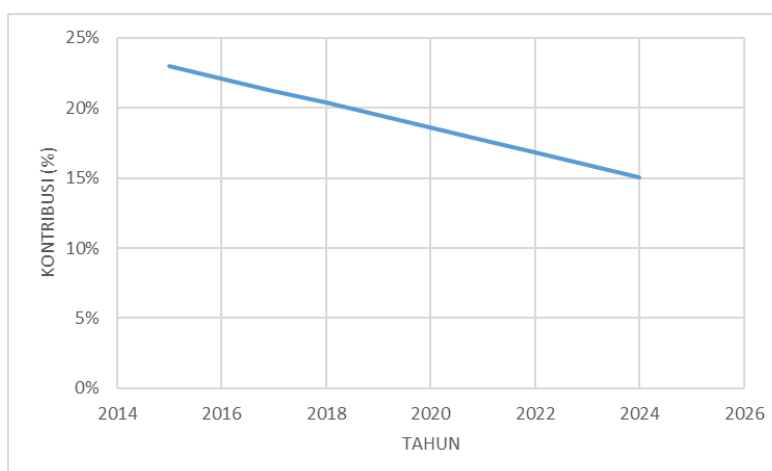


Sumber : Olah Data Microsoft Excel

Grafik menunjukkan bahwa kontribusi PKB terhadap PAD mengalami tren meningkat secara bertahap selama periode 2015–2024. Nilainya naik dari sekitar 19% pada awal periode menjadi sekitar 22% pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa peran PKB terhadap PAD semakin kuat, meskipun kenaikannya berlangsung secara perlahan dan stabil.

Trend Kontribusi BBNKB Terhadap PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2024

Grafik 2. Grafik Trend kontribusi BBNKB terhadap PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2024



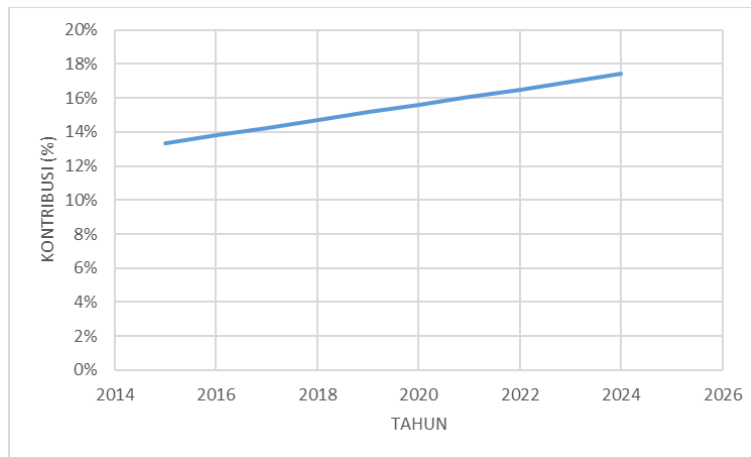
Sumber : Olah Data Microsoft Excel

Grafik tersebut menunjukkan bahwa kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(BBNKB) terhadap PAD mengalami tren menurun secara bertahap selama periode 2015–2024. Nilainya turun dari sekitar 22% pada awal periode menjadi sekitar 15% pada tahun 2024.

Trend Kontribusi PBBKB Terhadap PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2024

Grafik 3. Grafik Trend kontribusi PBBKB terhadap PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2024

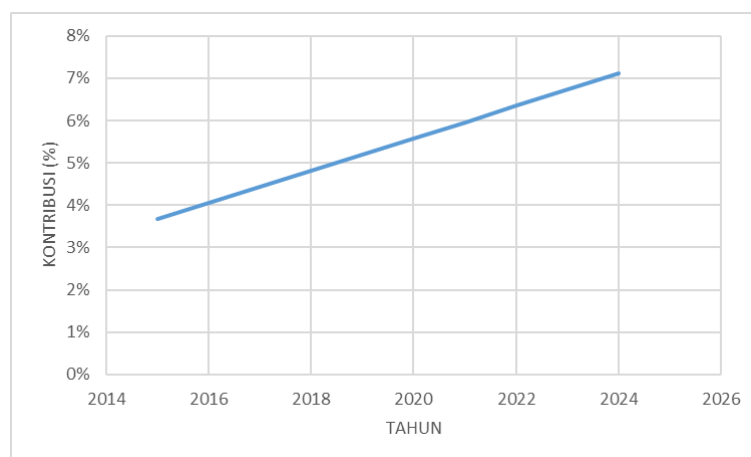


Sumber : Olah Data Microsoft Excel

Grafik tersebut menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) terhadap PAD mengalami tren meningkat secara bertahap selama periode 2015–2024. Nilainya naik dari sekitar 12% pada awal periode menjadi sekitar 17% pada tahun 2024.

TREND KONTRIBUSI PAP TERHADAP PAD PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015-2024

Gambar 4. Grafik Trend kontribusi PAP terhadap PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2024

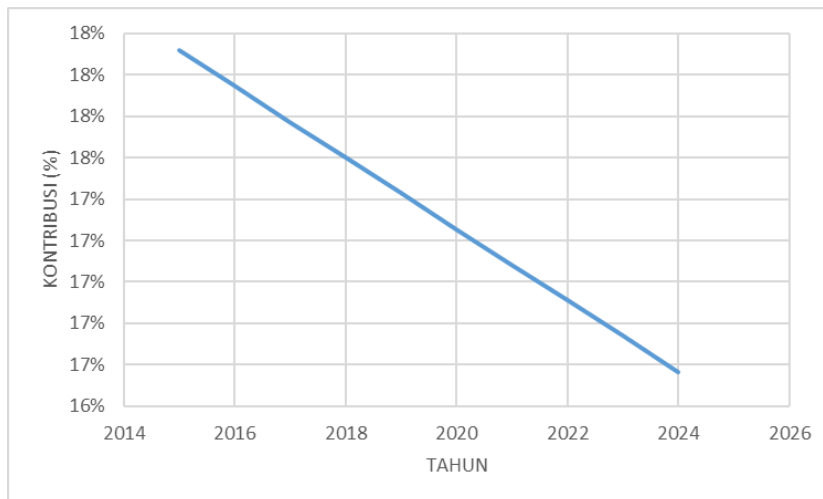


Sumber : Olah Data Microsoft Excel

Grafik menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Air Permukaan terhadap PAD mengalami tren meningkat secara bertahap selama periode 2015–2024. Nilainya naik dari sekitar 3% pada awal periode menjadi sekitar 5% pada tahun 2024.

Trend Kontribusi Pajak Rokok Terhadap PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2024

Grafik 5. Grafik Trend kontribusi Pajak Rokok terhadap PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2024

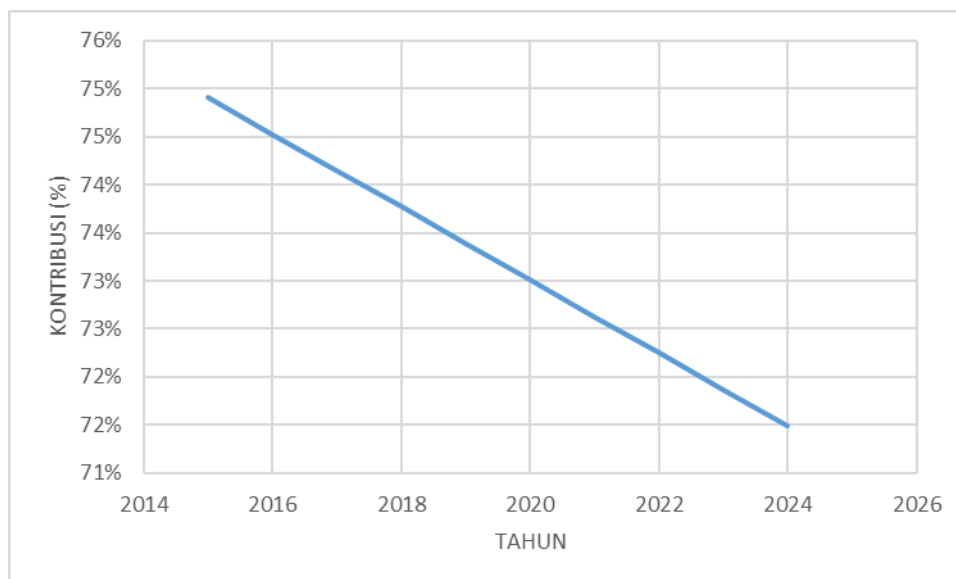


Sumber : Olah Data Microsoft Excel

Grafik menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Rokok terhadap PAD mengalami tren meningkat secara perlahan selama periode 2015–2024. Nilainya cenderung stabil.

Trend Kontribusi Pajak Provinsi Terhadap PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2024

Grafik 6. Grafik Trend kontribusi Pajak Provinsi terhadap PAD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015-2024



Sumber : Olah Data Microsoft Excel

Grafik tersebut menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Provinsi terhadap PAD mengalami tren meningkat secara konsisten selama periode pengamatan. Nilainya cenderung stabil dari awal

periode sampai akhir.

Pembahasan

Kontribusi dan Trend PKB Terhadap PAD Provinsi NTB Tahun 2015-2024

Berdasarkan hasil penelitian, kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2015–2024 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi namun cenderung stabil pada kategori sedang dengan rata-rata sebesar 21%. Kontribusi terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 17%, sedangkan pada periode 2018–2024 kontribusi PKB relatif stabil pada kisaran 22%–24%. Selain itu, berdasarkan grafik tren terlihat bahwa kontribusi PKB terhadap PAD mengalami peningkatan secara bertahap dari sekitar 19% pada awal periode menjadi sekitar 22% pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa PKB memiliki peran yang cukup penting dan semakin kuat dalam mendukung penerimaan PAD, meskipun peningkatannya masih berlangsung secara perlahan sehingga optimalisasi penerimaan PKB tetap perlu dilakukan agar kontribusinya terhadap PAD dapat lebih maksimal (Waisapy stenly almedio & Nussy Trudy Maryona, 2024). Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Anggun Prasiwi et al., (2025) yang menjelaskan bahwa PKB merupakan salah satu sumber pajak daerah yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap PAD dan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan kontribusi tersebut dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, meningkatnya kepatuhan wajib pajak, serta upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemungutan pajak daerah (Anggun Prasiwi et al., 2025). Selain itu, penerimaan PKB dinilai relatif stabil sehingga mampu menjadi salah satu sumber utama dalam mendukung peningkatan PAD dan kemandirian keuangan daerah (Waisapy stenly almedio & Nussy Trudy Maryona, 2024).

Kontribusi Dan Trend BBNKB Terhadap PAD Provinsi NTB Tahun 2015-2024

Berdasarkan hasil penelitian, kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTB selama tahun 2015–2024 cenderung berfluktuasi dengan rata-rata sebesar 20% dan termasuk dalam kategori sedang. Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 24%, sedangkan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 15%. Selain itu, grafik tren menunjukkan bahwa kontribusi BBNKB mengalami penurunan secara bertahap dari sekitar 22% pada awal periode menjadi sekitar 15% pada tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun BBNKB masih memberikan peranan terhadap PAD, kontribusinya cenderung melemah dalam beberapa tahun terakhir (Subroto & Sudibyo, 2025). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Yuanita Muara & Karundeng, 2023) yang menyatakan bahwa kontribusi BBNKB terhadap PAD mengalami penurunan dan pertumbuhannya cenderung fluktuatif akibat menurunnya transaksi kendaraan bermotor serta perlambatan ekonomi daerah. Penelitian Pandingan & Hutapea, (2025) juga menjelaskan bahwa kontribusi BBNKB lebih rendah dibandingkan PKB karena penerimaan BBNKB sangat dipengaruhi oleh aktivitas jual beli kendaraan dan tingkat kepatuhan masyarakat dalam melakukan balik nama kendaraan. Selain itu, penurunan kontribusi BBNKB pada periode 2020–2023 diduga dipengaruhi oleh dampak pascapandemi

yang menyebabkan penurunan daya beli masyarakat dan berkurangnya transaksi kendaraan bermotor. (Subroto & Sudibyo, 2025).

Kontribusi dan Trend PBBKB Terhadap PAD Provinsi NTB Tahun 2015-2024

Berdasarkan hasil penelitian, kontribusi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTB selama tahun 2015–2024 tergolong rendah dengan rata-rata sebesar 16%. Kontribusi PBBKB berada pada kisaran 12%–18%, dengan nilai terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 12%. Meskipun demikian, grafik tren menunjukkan bahwa kontribusi PBBKB mengalami peningkatan secara bertahap dari sekitar 12% pada awal periode menjadi sekitar 17% pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerimaan PBBKB masih memberikan peranan terhadap PAD, namun kontribusinya belum optimal dibandingkan jenis pajak daerah lainnya (Yuanita Muara & Karundeng, 2023). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Yuanita Muara & Karundeng, 2023) yang menyatakan bahwa kontribusi PBBKB terhadap PAD cenderung berfluktuatif dan belum memberikan kontribusi yang besar karena sangat dipengaruhi oleh tingkat konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor serta aktivitas ekonomi masyarakat. Penelitian (Meiriasari & Kemala Ratu, 2022) juga menjelaskan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah, termasuk PBBKB, dapat terjadi seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan penggunaan kendaraan bermotor dari tahun ke tahun.

Kontribusi dan Trend PAP Terhadap PAD Provinsi NTB Tahun 2015-2024

Berdasarkan hasil penelitian, kontribusi Pajak Air Permukaan (PAP) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTB selama tahun 2015–2024 tergolong sangat rendah dengan rata-rata sebesar 6%. Kontribusi PAP berada pada kisaran 2%–8%, dengan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 2% dan tertinggi pada tahun 2021 serta 2024 sebesar 5%. Meskipun demikian, grafik tren menunjukkan bahwa kontribusi PAP mengalami peningkatan secara bertahap dari sekitar 3% pada awal periode menjadi sekitar 5% pada tahun 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa PAP masih memiliki peran yang sangat kecil terhadap PAD, namun penerimaannya cenderung meningkat dari tahun ke tahun (Listiani et al., 2022). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Listiani et al., (2022) yang menyatakan bahwa Pajak Air Permukaan belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD karena objek pajaknya terbatas pada pihak yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk kegiatan tertentu. Selain itu, rendahnya kontribusi PAP juga dipengaruhi oleh belum optimalnya pemungutan dan pengawasan pajak air permukaan di daerah sehingga penerimaannya belum maksimal (Hanifah Neli et al., 2023). Namun, adanya tren peningkatan kontribusi menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai melakukan upaya optimalisasi pengelolaan dan pemungutan PAP sebagai salah satu sumber penerimaan daerah (Hanifah Neli et al., 2023).

Kontribusi dan Trend Pajak Rokok Terhadap PAD Provinsi NTB Tahun 2015-2024

Berdasarkan hasil penelitian, kontribusi Pajak Rokok (PR) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTB selama tahun 2015–2024 tergolong rendah dengan rata-rata

sebesar 18%. Kontribusi Pajak Rokok sebagian besar berada pada kisaran 15%–19%, sedangkan kategori sedang hanya terjadi pada tahun 2017 dan 2020 sebesar 20%. Selain itu, grafik tren menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Rokok cenderung stabil dan mengalami peningkatan secara perlahan selama periode penelitian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pajak Rokok tetap memberikan sumbangan terhadap PAD, namun kontribusinya belum terlalu besar dibandingkan jenis pajak daerah lainnya (Cipta et al., 2021). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Cipta et al., (2021) yang menjelaskan bahwa Pajak Rokok merupakan salah satu sumber penerimaan pajak daerah provinsi yang berasal dari pembagian cukai rokok oleh pemerintah pusat sehingga penerimaannya cenderung stabil setiap tahun. Selain itu, kontribusi Pajak Rokok yang masih rendah dipengaruhi oleh kebijakan tarif cukai rokok nasional dan tingkat konsumsi masyarakat yang menentukan besarnya penerimaan daerah dari sektor tersebut (Cipta et al., 2021). Kestabilan kontribusi Pajak Rokok juga menunjukkan bahwa pajak ini tetap memiliki potensi sebagai sumber pendapatan daerah meskipun pertumbuhannya tidak terlalu signifikan dibandingkan pajak daerah lainnya (Djasuli et al., 2025).

Kontribusi dan Trend Pajak Provinsi Terhadap PAD Provinsi NTB Tahun 2015-2024

Berdasarkan hasil penelitian, kontribusi Pajak Provinsi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi NTB selama tahun 2015–2024 tergolong tinggi dengan rata-rata sebesar 76%. Kontribusi Pajak Provinsi cenderung stabil pada kisaran 67%–78%, dengan kontribusi terendah terjadi pada tahun 2023 sebesar 67% dan tertinggi pada tahun 2024 sebesar 70%. Grafik tren juga menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Provinsi mengalami peningkatan yang relatif konsisten selama periode penelitian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pajak Provinsi menjadi sumber utama PAD dan memiliki peran dominan dalam mendukung kemandirian keuangan daerah (Jannati & Meirina, 2025). Besarnya kontribusi Pajak Provinsi yang mencapai sekitar 70% menunjukkan bahwa sebagian besar PAD masih bersumber dari penerimaan pajak daerah, sedangkan sisanya berasal dari sumber PAD lainnya seperti retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Kurnia & Gunarto, 2024). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Jannati & Meirina, (2025) yang menyatakan bahwa pajak daerah merupakan komponen terbesar dalam pembentukan PAD karena memiliki potensi penerimaan yang lebih besar dibandingkan sumber pendapatan daerah. Selain itu, stabilnya kontribusi Pajak Provinsi terhadap PAD menunjukkan bahwa pemerintah daerah cukup efektif dalam melakukan pengelolaan dan optimalisasi penerimaan pajak daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah (Jannati & Meirina, 2025).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pajak provinsi memiliki peran penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015–2024. PKB memberikan kontribusi rata-rata sebesar 21% dan cenderung meningkat sehingga menjadi

salah satu sumber penerimaan daerah yang cukup stabil. BBNKB memberikan kontribusi sebesar 20%, tetapi cenderung menurun seiring berkurangnya transaksi kendaraan bermotor dan perlambatan ekonomi. PBBKB memiliki kontribusi sebesar 16% dan menunjukkan peningkatan secara perlahan, sedangkan PAP memberikan kontribusi paling rendah sebesar 6% karena keterbatasan objek pajak dan belum optimalnya pemungutan. Sementara itu, Pajak Rokok memberikan kontribusi sebesar 18% dengan penerimaan yang relatif stabil. Secara keseluruhan, pajak provinsi memberikan kontribusi rata-rata sebesar 76% terhadap PAD dan menunjukkan tren yang relatif stabil, yang mengindikasikan bahwa PAD Provinsi NTB masih sangat bergantung pada penerimaan pajak daerah. Penelitian ini mampu memberikan gambaran mengenai kontribusi masing-masing jenis pajak terhadap PAD, namun masih terbatas pada analisis kontribusi sehingga belum mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pajak secara lebih mendalam.

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat disarankan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak, pengurangan tunggakan, serta penguatan sistem pemungutan yang efektif. Digitalisasi perpajakan daerah juga perlu terus dikembangkan melalui pembayaran pajak secara daring dan integrasi data kendaraan melalui sistem SAMSAT untuk meningkatkan transparansi, meminimalkan kebocoran penerimaan, serta memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan analisis mengenai efektivitas, efisiensi, pertumbuhan pajak daerah, serta faktor-faktor lain yang memengaruhi penerimaan pajak agar penelitian mengenai pajak daerah dan PAD dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adan, H., Atsebi, J.-M. B., Gueorguiev, N., Honda, J., & Nose, M. (2023). *Quantifying the revenue yields from tax administration reforms* (WP/23/231).
- Afonso, A., Tovar Jalles, J., & Venâncio, A. (2024). Fiscal decentralization and public sector efficiency: Do natural disasters matter? *Economic Modelling*, 137, 106763. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2024.106763>
- Anggun Prasiwi, G., Faradhila, G. L., Dewi, M. Z., & Rahmandhani, A. Z. P. (2025). Analisis kontribusi pajak daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur 2020–2024. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*, 2(2), 292–303. <https://doi.org/10.61132/jieap.v2i2.1144>
- Aprianto, E. (2025). *Analisis efektivitas, kontribusi, dan potensi pajak daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)*.
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. (2025, August). *Pendapatan daerah 2015–2025*.
- Benitez, J. C., Mansour, M., Pecho, M., & Vellutini, C. (2023). *Building tax capacity in developing countries*.

- Cipta, H., Malawere, N. C., Sondakh, J. J., & Tangkuman, S. J. (2021). The implementation of the cigarette tax revenue sharing that has been carried out by the Regional Revenue Agency of North Sulawesi Province. *Jurnal LPPM Bidang Ekososbudkum*, 5(1).
- Djasuli, M., Amalia, S. Y., Ayu, D. R., & Hasanah, F. (2025). *Cigarette tax dilemma: Suppressing consumption or harming tobacco farmers*, 2.
- Dong, S. X., Satyadini, A., & Sinning, M. (2025). *Location matters: Insights from a natural field experiment to enhance small business tax compliance in Indonesia*. IZA.
- Dumortier, J., Zhang, F., & Marron, J. (2017). State and federal fuel taxes: The road ahead for U.S. infrastructure funding. *Transport Policy*, 53, 39–49. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2016.08.013>
- Friedson, A., Li, M., Meckel, K., Rees, D. I., & Sacks, D. W. (2021). *Cigarette taxes, smoking, and health in the long run*. IZA.
- Guindon, G. E., Paraje, G. R., & Chaloupka, F. J. (2015). The impact of prices and taxes on the use of tobacco products in Latin America and the Caribbean. *American Journal of Public Health*, 105(3), e9–e19. <https://doi.org/10.2105/AJPH.2014.302396>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2018). *Basic econometrics*.
- Hadi Rafsanjani, A., & Agustina, N. (2022). Analysis of local tax performance through tax capacity and tax effort in Indonesia 2014–2018. *Asian Journal of Business Environment*, 12(4), 43–53. <https://doi.org/10.13106/ajbe.2022.vol12.no2.43>
- Hanifah, N., Nurmilah, R., & Tanjung, H. (2023). *Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Air Permukaan (PAP) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (PPPDDW) Kota Sukabumi*.
- Hao, Y., Chen, Y. F., Liao, H., & Wei, Y. M. (2020). China's fiscal decentralization and environmental quality: Theory and an empirical study. *Environment and Development Economics*, 25(2), 159–181. <https://doi.org/10.1017/S1355770X19000263>
- Haryadi, W. (2019). Analisis pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 7(2).
- Jannati, R., & Meirina, E. (2025). Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat tahun 2019–2023. *Center of Economic Student Journal*, 8(1). <https://doi.org/10.56750/csej.v8i1.1087>
- Kurnia, A. D., & Gunarto, T. (2024). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis (JEBS)*, 4(5), 1071–1076. <https://doi.org/10.47233/jebs.v4i5.2080>
- Lauwrenza, V., & Agustiningsih, W. (n.d.). *Penerapan aplikasi Samsat Digital Nasional (SIGNAL) terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tangerang*.
- Lewis, B. D. (2023). Indonesia's new fiscal decentralisation law: A critical assessment. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 59(1), 1–28. <https://doi.org/10.1080/00074918.2023.2180838>
- Listiani, W. S., Agustianto, J. P., & Kusyeni, R. (2022). Analisis pemungutan Pajak Air Permukaan

- dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Bapenda Cikokol tahun 2019–2021. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(5), 563–569.
- Meiriasari, V., & Kemala Ratu, M. (2022). Analisis efektivitas, kontribusi dan laju pertumbuhan PBBKB terhadap PAD Sumatera Selatan. 8(1).
- Musviyanti, Khairin, F. N., Bone, H., Syakura, M. A., & Yударuddin, R. (2022). Structure of local government budgets and local fiscal autonomy: Evidence from Indonesia. *Public and Municipal Finance*, 11(1), 79–89. [https://doi.org/10.21511/pmf.11\(1\).2022.07](https://doi.org/10.21511/pmf.11(1).2022.07)
- Nisa Mukarramatun, Razif, Nurhasanah, & Arliansyah. (2024). Analisis pengaruh pengenaan pajak kendaraan. *Jurnal Akuntansi Malikussaleh*, 3.
- Oates, W. E. (1972). *Fiscal federalism*. Harcourt Brace Jovanovich.
- Pandangan, M., & Hutapea, J. Y. (2025). *Kontribusi PKB dan BBNKB bagi pajak daerah Provinsi Jawa Barat*.
- Pandoyo. (2024). The role of fiscal decentralization in sustainable local economic development. *Sinergi International Journal of Accounting & Taxation*, 1(2).
- Saukhan Aulana, M., Salsabila, A., Hardini, F. D., Wulandari Aji, A., & Amarta Putra, A. (2025). Kegagalan sistem perpajakan dalam menekan peredaran rokok ilegal di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Perpajakan (BIJAK)*, 7(1). <https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jb/>
- Shimul, S. N., & Huang, J. (2025). Does raising tobacco taxes reduce the burden of non-communicable diseases? A panel data analysis of 152 countries. *BMJ Open*, 15(7). <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2024-097447>
- Subki, F. H., & Martiningsih, R. S. P. (2024). Fiscal accounting strategies in optimizing local revenue through taxes on PKB and BBNKB. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research*, 3(9), 3195–3212. <https://doi.org/10.55927/fjmr.v3i9.11125>
- Subroto, V. K., & Sudibyo, S. K. (2025). Assessing the contribution and effectiveness of motor vehicle taxes in enhancing regional revenue: Evidence from Central Java Province. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 18(2), 725–743. <https://doi.org/10.51903/kompak.v18i2.3161>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*.
- Taroreh, E. I., Runtu, T., & Mintalangi, S. S. E. (2024). Analisis pengenaan tarif dan perhitungan Pajak Air Permukaan pada wajib pajak berdasarkan Perda Sulut Nomor 5 Tahun 2018 (Studi kasus pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara). *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 414–420. <https://doi.org/10.58784/rapi.219>
- Waisapy, S. A., & Nussy, T. M. (2024). Analisis kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Administrasi Terapan*.
- Wowiling, S. S., & Ilat, V. (2015). Analysis of procedure and calculation of vehicle title transfer tax at Regional Revenue Department of North Sulawesi Province. *Jurnal EMBA*, 3(2).
- Yuanita Muara, & Karundeng. (2023). *Analisis kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan terhadap penerimaan peningkatan pendapatan*.